



PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 29 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, perlu didukung dengan rencana kerja perangkat daerah yang terintegrasi dengan rencana pembangunan nasional yang dilakukan secara baik, profesional, terarah, dan berkesinambungan;
 - b. bahwa berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025, perlu disesuaikan dengan asumsi kerangka ekonomi daerah, asumsi keuangan daerah, serta kondisi terkini perangkat daerah;
 - c. bahwa Peraturan Bupati Bantul Nomor 41 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025, perlu diubah untuk mengakomodir kebutuhan daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan RKPD adalah dokumen perubahan perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perubahan perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
3. Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perubahan perencanaan dan penganggaran yang berisi perubahan rencana pendapatan, perubahan rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta perubahan rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Bantul.
6. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

Pasal 2

- (1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 ini disusun dengan mengacu pada Perubahan RKPD Tahun 2025.
- (2) Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2025.

Pasal 3

Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV : PENUTUP

Pasal 4

- (1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:
 - a. Perubahan Renja Sekretariat Daerah;
 - b. Perubahan Renja Sekretariat DPRD;
 - c. Perubahan Renja Inspektorat Daerah;
 - d. Perubahan Renja Dinas Daerah yang terdiri atas:
 1. Perubahan Renja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;

2. Perubahan Renja Dinas Kesehatan;
 3. Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 4. Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 5. Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 6. Perubahan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
 7. Perubahan Renja Dinas Sosial;
 8. Perubahan Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*);
 9. Perubahan Renja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*);
 10. Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 11. Perubahan Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
 12. Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup;
 13. Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 14. Perubahan Renja Dinas Perhubungan;
 15. Perubahan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika;
 16. Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 17. Perubahan Renja Dinas Pariwisata;
 18. Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja;
 19. Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan;
 20. Perubahan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan.
- e. Perubahan Renja Badan Daerah yang terdiri atas:
1. Perubahan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 2. Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
 3. Perubahan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia;
 4. Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 5. Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- f. Perubahan Renja Kapanewon yang terdiri atas:
1. Perubahan Renja Kapanewon Srandakan;
 2. Perubahan Renja Kapanewon Sanden;
 3. Perubahan Renja Kapanewon Kretek;
 4. Perubahan Renja Kapanewon Pundong;
 5. Perubahan Renja Kapanewon Bambanglipuro;
 6. Perubahan Renja Kapanewon Pandak;
 7. Perubahan Renja Kapanewon Pajangan;
 8. Perubahan Renja Kapanewon Bantul;
 9. Perubahan Renja Kapanewon Jetis;
 10. Perubahan Renja Kapanewon Imogiri;
 11. Perubahan Renja Kapanewon Dlingo;
 12. Perubahan Renja Kapanewon Banguntapan;
 13. Perubahan Renja Kapanewon Pleret;
 14. Perubahan Renja Kapanewon Piyungan;
 15. Perubahan Renja Kapanewon Sewon;

- 16. Perubahan Renja Kapanewon Kasihan;
- 17. Perubahan Renja Kapanewon Sedayu.
- g. Perubahan Renja Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati.
- (2) Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 26 Juni 2025
BUPATI BANTUL

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 26 Juni 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,


SETDA
AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 NOMOR 32

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 29 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025

PERUBAHAN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025
KAPANEWON SEWON
KABUPATEN BANTUL

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah menyatakan bahwa Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan perubahan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan I Tahun 2025 menunjukkan bahwa perlu dilakukan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025. Perubahan Renja Kapanewon sewon Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja Kapanewon sewon Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;

- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- g. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan;
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- j. Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kapanewon;
- k. Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Kapanewon sewon Tahun 2025 disusun dengan maksud untuk menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan asumsi keuangan daerah serta menyesuaikan permasalahan Perangkat Daerah dengan kondisi terkini.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renja Kapanewon Tahun 2025 adalah sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2025.

1.4. Sistematika

Sistematika penulisan Perubahan Renja Kapanewon sewon Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

Evaluasi Renja Kapanewon sewon Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I dilakukan terhadap penilaian realisasi DPA Kapanewon sewon. Evaluasi Renja tersebut digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.

Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan I 2025

Nama Perangkat Daerah: Kapanewon sewon

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
I.	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Cakupan pembinaan kelembagaan adat dan tradisi	persen	1	60.000.000	-	-	0%	0%	
I.	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Capaian kinerja pembinaan kelembagaan adat dan tradisi	persen	1	60.000.000	-	-	0%	0%	
	Gelar Budaya Jogja	Gelar seni dan budaya dalam rangka hari keistimewaan DIY	even	1	60.000.000	-	-	0%	0%	
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	persentase perencanaan pengendalian urusan keistimewaan yang berkualitas	persen	4	168.163.400	-	-	0%	0%	
I	Perencanaan dan Pengendalian Urusan Kebudayaan	persentase perencanaan pengendalian urusan keistimewaan yang berkualitas	persen	4	168.163.400	-	-	0%	0%	
	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	dokumen laporan pengendalian dan evaluasi keistimewaan	dokumen	4	168.163.400	-	-	0%	0%	
		dokumen rencana program dan kegiatan keistimewaan	dokumen							
III	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai AKIP	Angka	100	3.637.272.306	25	917.023.093	25%	25%	
I	Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian nilai akuntabilitas kinerja administrasi pemerintahan (AKIP)	Angka	100	4.800.000	25	1.200.000	25%	25%	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen perencanaan perangkat daerah	dokumen	100	2.400.000	25	600.000	25%	25%	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	dokumen hasil evaluasi	dokumen							

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	laporan	100	2.400.000	25	600.000	25%	25%	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian nilai akuntabilitas kinerja administrasi pemerintahan (AKIP)	persen	99	3.102.443.073	26	796.628.209	26%	26%	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah	kali							
		pembayaran TPP	kali							
		Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	orang/bulan	22	3.045.083.073	26	782.288.209	117%	26%	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	dokumen	100	54.960.000	25	13.740.000	25%	25%	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan bulanan/triwulana/semesteran SKPD		laporan	100	2.400.000	25	600.000	25%	25%	
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian nilai akuntabilitas kinerja administrasi pemerintahan (AKIP)	persen	100	2.900.000	38	1.100.000	38%	38%	
	Monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja	Dokumen monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	dokumen	100	2.900.000	38	1.100.000	38%	38%	
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	persen	99	183.721.193	14	25.781.980	14%	14%	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan	jenis	100	3.072.820	28	867.500	28%	28%	
	"Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor"	jumlah paket pralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	paket	100	7.987.540	37	2.994.180	37%	37%	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	paket	100	3.895.300	46	1.795.300	46%	46%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	"Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah paket barang cetatan dan penggandaan yang disediakan	paket	100	8.801.533	34	3.000.000	34%	34%	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang disediakan	dokumen	100	1.500.000	25	375.000	25%	25%	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	laporan	99	151.864.000	10	15.100.000	10%	10%	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	jumlah dokumen penata usahaan arsip dinamis pada SKPD	dokumen	100	3.000.000	25	750.000	25%	25%	
	Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	dokumen	100	3.600.000	25	900.000	25%	25%	
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian nilai akuntabilitas kinerja administrasi pemerintahan (AKIP)	persen	1	38.500.000	1	10.000.000	100%	26%	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	pengadaan peralatan dan mesin lainnya	unit	1	38.500.000	1	10.000.000	100%	26%	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	pengadaan mebel	unit	1	-	-	-			
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian nilai akuntabilitas kinerja administrasi pemerintahan (AKIP)	persen	100	179.496.192	30	53.242.056	30%	30%	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai dana benda pos	Lembar							
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumbr Daya Air dan Listrik	jumlah laporan penyedia laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	laporan	96	51.000.000	24	12.313.262	25%	24%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyedia jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	laporan	100	10.455.000	45	4.725.000	45%	45%	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyedia jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	laporan	99	118.041.192	31	36.203.794	31%	31%	
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian nilai akuntabilitas kinerja administrasi pemerintahan (AKIP)	persen	95	125.411.848	23	29.070.848	24%	23%	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	unit	94	119.513.048	19	23.172.048	21%	19%	
		pemeliharaan kendaraan dinas roda 3	unit							
		pemeliharaan kendaraan dinas roda 4	unit							
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor dan bangunan lainya yang dipelihara / direhabilitasi	unit	98	5.898.800	100	5.898.800	102%	100%	
IV	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaeaan pemerintahan dan pelayanan publik	persen	100	29.380.000	14	4.025.000	14%	14%	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	persen	100	19.550.000	18	3.525.000	18%	18%	
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	jumlah laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	dokumen	100	8.500.000	26	2.250.000	26%	26%	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	jumlah laporan peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan	dokumen	100	11.050.000	12	1.275.000	12%	12%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		lap. pelaksanaan sosialisasi pendaftaran tanah	dokumen							
		lap.. Pembinaan pengendalian pemerintahan desa	dokumen							
		laporan pendampingan keuangan desa	dokumen							
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	Capaian penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	persen	100	9.830.000	5	500.000	5%	5%	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperiinan	jumlah laporan perizinan usaha yang dilaksanakan	dokumen	100	9.830.000	5	500.000	5%	5%	
V	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan kepada masyarakat	persen	100	137.009.488	22	30.275.000	22%	22%	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	cakupan pemberdayaan kepada masyarakat	persen	100	81.075.000	33	26.900.000	33%	33%	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	dokumen	100	20.000.000	100	20.000.000	100%	100%	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	jumlah laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	dokumen	100	61.075.000	11	6.900.000	11%	11%	
		laporan bidang sosial	dokumen							
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Cakupan pemberdayaan kepada masyarakat	persen	100	55.934.488	6	3.375.000	6%	6%	
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	jumlah laporan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	dokumen	100	55.934.488	6	3.375.000	6%	6%	
VI	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	persen	100	192.285.000	2	3.857.500	2%	2%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	cakupan koordinasi ketentraman dan ketertiban kapanewon	persen	100	192.285.000	2	3.857.500	2%	2%	
	"Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan "	jumlah laporan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	dokumen	100	192.285.000	2	3.857.500	2%	2%	
VII	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan umum	persen	100	20.347.500	-	-	0%	0%	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Cakupan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan umum	persen	100	20.347.500	-	-	0%	0%	
	"Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila. Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia"	"jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila. Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia"	orang	100	20.347.500	-	-	0%	0%	
		Jumlah			4.244.457.694		955.180.593		23%	

Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Kapanewon sewon Tahun 2025 sampai dengan Trwiwulan I, ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:

- a. Masih terdapat SHBJ yang tidak sesuai dengan Harga pembelian
- b. Mundurnya jadwal pencairan anggaran (Dana Keistimewaan)
- c.
- d. dst.

Permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan I tersebut, menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan yang akan ditempuh sampai dengan Triwulan IV dan menjadi salah satu dasar penyusunan rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pada Perubahan Tahun 2025 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Perumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan pada Perubahan Tahun 2025 berdasarkan pada permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan I dan kebutuhan prioritas yang harus ditindaklanjuti.

Rumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan pada Perubahan Renja Kapanewon sewon Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH KAPANEWON SEWON KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkura ng (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		KAPANEWON SEWON								3.846.548.227,00	4.156.294.294,00	4.146.763.394,00	300.215.167,00					4.451.134.933,00		
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							140.000.000,00	140.000.000,00	197.663.400,00	57.663.400,00							116.040.000,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							140.000.000,00	140.000.000,00	197.663.400,00	57.663.400,00							116.040.000,00	
1.	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	jumlah laporan gelar budaya Yogyakarta				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	30.000.000,00	-50.000.000,00							50.000.000,00	
	2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Jumlah laporan gelar budaya Yogyakarta				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	30.000.000,00	-70.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informatika	Masyarakat, pelaku seni dan UMKM		50.000.000,00	KAPANEWON SEWON
	2.22.08.5.07.0006	Gelar Budaya Jogja																		
			Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	30.000.000,00	-70.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Sewon, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informatika			50.000.000,00	KAPANEWON SEWON

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkura ng (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		KABUPATEN/KOTA																		
	7.01.0 1.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian nilai akuntabilitas kinerja administrasi pemerintahan (Akip)				100 Persen	100 Persen	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informatika	Kapanewon		5.900.000,00	KAPANEWON SEWON
	7.01.0 1.2.01. 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	7 Dokumen	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Sewon, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informatika			3.500.000,00	KAPANEWON SEWON
	7.01.0 1.2.01. 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	5 Laporan	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Sewon, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi			2.400.000,00	KAPANEWON SEWON

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkura ng (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				3 Dokumen	3 Dokumen	54.960.000,00	54.960.000,00	54.960.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Sewon, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			101.790.172,00	KAPANEWON SEWON
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulana n/ Semesteran SKPD				22 Laporan	22 Laporan	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Sewon, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			2.400.000,00	KAPANEWON SEWON
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian nilai akuntabilitas kinerja administrasi pemerintahan (Akip)				100 Persen	100 Persen	2.900.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	Kapanewon		2.900.000,00	KAPANEWON SEWON
	7.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				4 Dokumen	4 Dokumen	2.900.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Sewon, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			2.900.000,00	KAPANEWON SEWON

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengelola administrasi umum				99 Persen	99 Persen	173.721.193,00	183.721.193,00	154.553.537,00	-19.167.656,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	Kapanewon		339.733.886,00	KAPANEWON SEWON
	7.01.01.2.06.00.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	3.072.820,00	3.072.820,00	3.072.820,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Sewon, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			7.196.500,00	KAPANEWON SEWON
	7.01.01.2.06.00.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	7.987.540,00	7.987.540,00	7.987.540,00	0,00	Kab. Bantul, Sewon, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			12.333.600,00	KAPANEWON SEWON
	7.01.01.2.06.00.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	3.895.300,00	3.895.300,00	3.895.300,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Sewon, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			16.603.612,00	KAPANEWON SEWON

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkura ng (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01. 01.2. 06.00 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	8.801.533,00	8.801.533,00	7.865.877,00	-935.656,00	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Sewon, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			7.760.750,00	KAPANEWON SEWON
	7.01.01.2 06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Sewon, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			1.300.000,00	KAPANEWON SEWON
	7.01.01.2 06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				128 Laporan	128 Laporan	141.864.000,00	151.864.000,00	123.632.000,00	-18.232.000,00	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Sewon, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			285.302.424,00	KAPANEWON SEWON
	7.01.01.2 06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausa haan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Sewon, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			5.637.000,00	KAPANEWON SEWON

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkura ng (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01 .2.06.0 011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	Kab. Bantul, Sewon, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			3.600.000,00	KAPANEWON SEWON
	7.01.01 .2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian nilai akuntabilita s kinerja administrasi pemerintaha n (Akip)				100 Persen	100 Persen	28.500.000,00	38.500.000,00	10.000.000,00	-18.500.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	Kapanew on		112.347.000,00	KAPANEWON SEWON
	7.01.01 .2.07.0 005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Sewon, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			20.000.000,00	KAPANEWON SEWON
	7.01.01 .2.07.0 006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	28.500.000,00	38.500.000,00	10.000.000,00	-18.500.000,00	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Sewon, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			92.347.000,00	KAPANEWON SEWON

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkura ng (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01 .2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian nilai akuntabilita s kinerja administrasi pemerintaha n (Akip)				100 Persen	100 Persen	179.496.192,00	179.496.192,00	207.304.548,00	27.808.356,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	Kapanew on		175.375.600,00	KAPANEWON SEWON
	7.01.01 .2.08.0 002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	51.000.000,00	51.000.000,00	51.000.000,00	0,00	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Sewon, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			40.000.000,00	KAPANEWON SEWON
	7.01.01 .2.08.0 003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	10.455.000,00	10.455.000,00	10.455.000,00	0,00	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Sewon, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			16.200.000,00	KAPANEWON SEWON
	7.01.01 .2.08.0 004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				5 Laporan	5 Laporan	118.041.192,00	118.041.192,00	145.849.548,00	27.808.356,00	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Sewon, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			119.175.600,00	KAPANEWON SEWON

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik				100 Persen	100 Persen	19.550.000,00	19.550.000,00	19.550.000,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P{ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P{ublic Berbasis Teknologi Informatika	Kapanewon dan Kalurahan		37.651.000,00	KAPANEWON SEWON
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				4 Laporan	4 Laporan	8.500.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Sewon, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P{ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P{ublic Berbasis Teknologi Informatika			10.864.000,00	KAPANEWON SEWON
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				4 Dokumen	4 Dokumen	11.050.000,00	11.050.000,00	11.050.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Sewon, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P{ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P{ublic Berbasis Teknologi Informatika			26.787.000,00	KAPANEWON SEWON
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-				-	-	9.830.000,00	9.830.000,00	9.780.000,00	-50.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P{ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P{ublic Berbasis Teknologi Informatika	Kapanewon dan Kalurahan		25.700.000,00	KAPANEWON SEWON
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				2 Dokumen	2 Dokumen	9.830.000,00	9.830.000,00	9.780.000,00	-50.000,00	Kab. Bantul, Sewon, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			25.700.000,00	KAPANEWON SEWON
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan kepada masyarakat				100 Persen	100 Persen	137.009.488,00	137.009.488,00	133.009.488,00	73.525.512,00							210.535.000,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Cakupan pemberdayaan kepada masyarakat				100 Persen	100 Persen	81.075.000,00	81.075.000,00	81.075.000,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	Kapanewon dan Kalurahan		141.500.000,00	KAPANEWON SEWON
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				2 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kab. Bantul, Sewon, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			26.000.000,00	KAPANEWON SEWON
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				16 Laporan	16 Laporan	61.075.000,00	61.075.000,00	61.075.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Sewon, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			115.500.000,00	KAPANEWON SEWON

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Cakupan pemberdayaan kepada masyarakat				100 Persen	100 Persen	55.934.488,00	55.934.488,00	51.934.488,00	-4.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	Kapanewon dan Kalurahan		69.035.000,00	KAPANEWON SEWON
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				6 Laporan	6 Laporan	55.934.488,00	55.934.488,00	51.934.488,00	-4.000.000,00	Kab. Bantul, Sewon, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			69.035.000,00	KAPANEWON SEWON
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupoan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum				100 Persen	100 Persen	192.285.000,00	192.285.000,00	166.575.000,00	27.909.692,00							220.194.692,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	cakupan koordinasi dan ketentraman dan ketertiban Kapanewon				100 Persen	100 Persen	192.285.000,00	192.285.000,00	166.575.000,00	-25.710.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	Kapanewon dan kalurahan		220.194.692,00	KAPANEWON SEWON
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				5 Laporan	5 Laporan	192.285.000,00	192.285.000,00	166.575.000,00	-25.710.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Sewon, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			220.194.692,00	KAPANEWON SEWON
5.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	cakupan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan umum				100 Persen	100 Persen	20.347.500,00	20.347.500,00	12.772.500,00	78.168.500,00							98.516.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	cakupan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan umum				100 Persen	100 Persen	20.347.500,00	20.347.500,00	12.772.500,00	-7.575.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	Kapanewon dan Kalurahan		98.516.000,00	KAPANEWON SEWON
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan				115 Orang	115 Orang	20.347.500,00	20.347.500,00	12.772.500,00	-7.575.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Sewon, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			98.516.000,00	KAPANEWON SEWON

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahan an dan Pemeliharaaa n Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																	
	J U M L A H								3.846.548.227,00	4.156.294.294,00	4.146.763.394,00	300.215.167,00							4.451.134.933,00	

Tabel dan data disesuaikan dengan hasil eksport dari aplikasi SIPD

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Renja Kapanewon sewon Tahun 2025 disusun berdasarkan hasil evaluasi yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

Selanjutnya, Perubahan Renja Kapanewon sewon Tahun 2025 akan menjadi pedoman dalam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2025.

Bantul, 11 Juni 2025

